



Public Consultation on the People's School Development Plan as a Forum for Community Participation in Tikonu Village, Kolaka Regency

La Mpia*, Suparman, Irwansyah, La Ode Muh Safaat, Musadia Afa, Riska, Fitrianti Handayani, dan Djunarlin Tojang

* la_mpia@yahoo.com

Fakultas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka- Indonesia. Kode Pos 93157.

ABSTRACT

This community service activity aimed to facilitate public participation in the planned development of a People's School in Tikonu Village, Wundulako District, Kolaka Regency. The activity was conducted on April 8, 2026, through a public consultation, presentation of the development plan and potential impacts, an open discussion, and questionnaire-based interviews with 65 respondents. The data were analysed descriptively by classifying socioeconomic characteristics, awareness, expectations, suggestions, concerns, social acceptance, and willingness to participate as workers. The results showed that 81.54% of respondents were aware of the development plan, 87.69% supported it, and 78.46% were willing to work if suitable opportunities were available. Community support was mainly driven by expectations of improved educational access, reduced school dropout, job creation, and local economic growth. Nevertheless, residents emphasised the protection of water sources, control of dust and noise, waste management, preservation of access to farmland, bridge improvement, information transparency, and priority for local workers and businesses. Public consultation functioned effectively as a two-way communication forum and helped establish initial social acceptance. Sustaining community support requires a grievance mechanism, meaningful participation in planning, implementation and monitoring, transparent local recruitment, and consistent environmental management.

Keywords: *public consultation, community participation, People's School, empowerment, environmental management*

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tikonu, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka. Kegiatan dilaksanakan pada 8 April 2026 melalui konsultasi publik, pemaparan rencana kegiatan dan potensi dampaknya, diskusi terbuka, serta wawancara menggunakan kuesioner kepada 65 responden. Data dianalisis secara deskriptif dengan mengelompokkan karakteristik sosial ekonomi, tingkat pengetahuan, harapan, saran, kekhawatiran, penerimaan sosial, serta minat masyarakat untuk terlibat sebagai tenaga kerja. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 81,54% responden telah mengetahui rencana pembangunan, 87,69% menyatakan setuju, dan 78,46% bersedia bekerja apabila tersedia kesempatan yang sesuai. Dukungan masyarakat terutama didorong oleh harapan akan peningkatan akses pendidikan, penurunan angka putus sekolah, pembukaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, masyarakat menekankan perlindungan sumber air, pengendalian debu dan kebisingan, pengelolaan sampah dan limbah, perlindungan akses jalan kebun, perbaikan jembatan, transparansi informasi, serta pemberian prioritas bagi tenaga kerja dan pelaku usaha lokal. Konsultasi publik yang efektif menjadi ruang komunikasi dua arah dan membangun penerimaan sosial sejak dini. Keberlanjutan dukungan masyarakat memerlukan tindak lanjut berupa mekanisme pengaduan, pelibatan masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan, kebijakan rekrutmen lokal yang transparan, serta penerapan pengelolaan lingkungan yang konsisten.



Kata kunci: konsultasi publik, partisipasi masyarakat, Sekolah Rakyat, pemberdayaan, pengelolaan lingkungan

Pendahuluan

Akses terhadap pendidikan berkualitas merupakan unsur mendasar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengurangan kemiskinan antargenerasi (Putra & Madya, 2020). Di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi, biaya pendidikan, jarak, dan ketidakmerataan fasilitas dapat meningkatkan risiko anak tidak melanjutkan sekolah. Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tikonu diarahkan sebagai layanan pendidikan inklusif bagi kelompok kurang mampu sekaligus sebagai instrumen pemerataan pembangunan di Kabupaten Kolaka.

Pembangunan fasilitas pendidikan tidak hanya menghasilkan dampak pendidikan, tetapi juga memengaruhi struktur sosial dan ekonomi, penggunaan ruang, lalu lintas, kualitas lingkungan, serta hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat harus ditempatkan sebagai proses substantif sejak tahap awal. Partisipasi yang baik mencakup penilaian kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta dipengaruhi oleh komunikasi, kebijakan pemerintah, dan persepsi masyarakat mengenai manfaat program (Khadijah et al., 2023). Pendekatan partisipatif juga meningkatkan kesesuaian program dengan kebutuhan lokal serta memperkuat tanggung jawab bersama (Asmoro et al., 2021; Muarifuddin, 2017).

Dalam konteks perencanaan wilayah, forum musyawarah yang berkesinambungan, kapasitas kelembagaan, dan keterlibatan unsur masyarakat menentukan kualitas dokumen pembangunan desa (Khadijah et al., 2022). Kolaborasi pemangku kepentingan juga diperlukan agar aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan tidak diperlakukan secara terpisah. Kocu et al., (2024) menunjukkan bahwa kualitas proses perencanaan lingkungan bergantung pada identifikasi peran, kepentingan, pengaruh, serta koordinasi antarpemangku kepentingan.

Laporan kegiatan yang menjadi dasar artikel ini mencatat bahwa pembangunan Sekolah Rakyat diproyeksikan di lahan sekitar delapan hektare, dengan fasilitas pendidikan dasar hingga menengah, asrama guru dan siswa, fasilitas ibadah, olahraga, ruang serbaguna, rumah kaca, serta area parkir. Pada tahap konstruksi dan operasional, kegiatan ini berpotensi menimbulkan debu, kebisingan, aliran permukaan, limbah, perubahan arus lalu lintas,

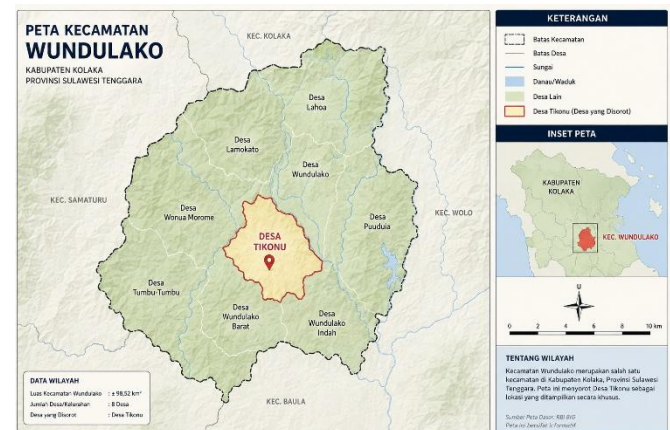
kesempatan kerja, perubahan pendapatan, serta perubahan sikap dan persepsi masyarakat. Situasi tersebut menuntut konsultasi publik yang tidak sekadar memenuhi prosedur, melainkan mampu menyerap aspirasi, memetakan kekhawatiran, dan merumuskan tindakan pengelolaan yang dapat dipantau.

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah: (1) menyampaikan informasi mengenai rencana pembangunan dan potensi dampaknya; (2) menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan saran, kekhawatiran, dan harapan; (3) mengidentifikasi tingkat penerimaan sosial dan minat untuk terlibat; serta (4) merumuskan rekomendasi tindak lanjut untuk memperkuat pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Metode

Lokasi dan waktu

Kegiatan dilaksanakan pada 8 April 2026, mulai pukul 10.00 WITA hingga selesai, di Aula Kantor Kecamatan Wundulako, Jalan Poros Pomalaa-Bombana, Desa Tikonu, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.



Gambar 1. Lokasi Pengabdian Masyarakat

Peserta dan pemangku kepentingan

Konsultasi publik dihadiri oleh unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka, Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka, Pemerintah Kecamatan Wundulako, Pemerintah Desa Tikonu, tim penyusun AMDAL, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, akademisi, serta masyarakat. Undangan konsultasi publik mencatat sekitar 30 peserta forum. Setelah forum, wawancara kuesioner dilakukan kepada 65 responden masyarakat di wilayah studi.

Tahapan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif yang terdiri dari 4 tahap. Pertama, koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Kedua, penyampaian informasi mengenai skala pembangunan, tahapan prakonstruksi, konstruksi dan operasi, serta potensi dampak geofisik-kimia, sosial ekonomi budaya, kesehatan masyarakat, dan transportasi. Ketiga, diskusi terbuka untuk menghimpun aspirasi. Keempat, wawancara tertutup menggunakan kuesioner kepada masyarakat yang hadir maupun masyarakat terdampak yang tidak mengikuti forum.

Instrumen dan analisis data

Instrumen memuat identitas responden, kondisi sosial ekonomi dan budaya, pengetahuan mengenai proyek, sikap terhadap rencana kegiatan, harapan dan kekhawatiran, serta minat untuk bekerja. Data kuantitatif ditabulasi dalam bentuk frekuensi dan persentase, sedangkan tanggapan terbuka dikelompokkan secara tematik. Artikel ini mempertahankan data yang terdapat dalam laporan kegiatan. Pada Tabel 5 laporan sumber, baris total tingkat pengetahuan tertulis 40, sedangkan jumlah kategori “ya” dan “tidak” adalah 65; analisis artikel menggunakan total 65 responden karena konsisten dengan seluruh tabel responden lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan konsultasi publik

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Camat Wundulako, dilanjutkan dengan penjelasan dari Dinas Lingkungan Hidup serta pemaparan rencana pembangunan oleh tim. Materi meliputi kebutuhan lahan, fasilitas yang akan dibangun, urutan pekerjaan, serta dampak potensial. Setelah pemaparan, peserta menyampaikan pertanyaan, saran, kekhawatiran dan harapan. Pola ini sejalan dengan prinsip konsultasi yang menggabungkan penyediaan informasi dan ruang umpan balik, bukan komunikasi satu arah.

Forum berlangsung kondusif dan menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat akan kepastian terkait dampak pembangunan. Pembahasan paling intensif berkaitan dengan akses jembatan dan jalan kebun, sumber air, debu dan kebisingan, pengelolaan sampah dan limbah, serta peluang kerja. Keterlibatan pemerintah desa dan kecamatan penting karena keduanya merupakan sumber informasi utama bagi masyarakat dan memiliki kedekatan sosial dengan warga. Studi Khadijah et al. (2023) juga menegaskan bahwa komunikasi dan kebijakan pemerintah merupakan faktor eksternal yang memengaruhi partisipasi.

Karakteristik responden

Tabel 1. Karakteristik dominan responden

Karakteristik	Kategori dominan	Jumlah	Persentase
Suku	Tolaki	57	87,69%
Umur	31–40 tahun	35	53,85%
Pendidikan	SMA/SMK/MA	52	80,00%
Pendapatan	Rp2.000.001–Rp3.000.000/bulan	23	35,39%

Sumber: Tabulasi data primer kegiatan, 2026.

Responden didominasi oleh masyarakat Tolaki dan kelompok usia produktif. Dominasi budaya lokal mengisyaratkan bahwa komunikasi pembangunan perlu melibatkan tokoh adat dan menggunakan pendekatan yang menghormati nilai-nilai setempat. Arief & Thahir (2025) menunjukkan bahwa lokalitas, ruang bersama, dan filosofi sosial dapat menjadi landasan bagi perencanaan partisipatif. Tingkat pendidikan responden yang relatif baik merupakan modal untuk memahami informasi teknis, tetapi bahasa sosialisasi tetap perlu disederhanakan agar risiko lingkungan dan mekanisme pengelolaan dapat dipahami dengan lebih mudah.

Sebagian besar pendapatan responden berada pada kelompok menengah ke bawah. Kondisi ini memperkuat relevansi Sekolah Rakyat sebagai layanan pendidikan bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Pada saat yang sama, kondisi ekonomi menjelaskan tingginya harapan agar proyek tersebut dapat menyerap tenaga kerja lokal dan memberikan peluang usaha. Pemberdayaan yang berhasil perlu menghubungkan peningkatan pengetahuan dengan akses yang nyata terhadap manfaat ekonomi (Akbar et al., 2021; Yusuf et al., 2022).

Pengetahuan dan sumber informasi

Tabel 2. Pengetahuan dan sumber informasi masyarakat

Indikator	Kategori	Jumlah	Persentase
Mengetahui rencana	Ya	53	81,54%
Mengetahui rencana	Tidak	12	18,46%
Sumber informasi	Pemerintah desa/kecamatan	30	56,60%*
Sumber informasi	Tetangga/kerabat	14	26,42%*
Sumber informasi	Pemrakarsa	9	16,98%*

Keterangan: *Persentase sumber informasi dihitung berdasarkan 53 responden yang mengetahui rencana kegiatan. Sumber: Tabulasi data primer kegiatan, 2026.

Tingkat pengetahuan sebesar 81,54% menunjukkan bahwa informasi awal telah menjangkau mayoritas responden. Namun, hanya 16,98% dari kelompok yang mengetahui rencana tersebut memperoleh informasi langsung dari

pemrakarsa. Ketergantungan pada pemerintah desa/kecamatan dan jejaring informal berpotensi menimbulkan variasi pemahaman. Karena itu, pemrakarsa perlu memperkuat kanal informasi resmi, menyediakan ringkasan dampak dalam bahasa yang sederhana, serta mempublikasikan jadwal dan tindak lanjut. Transparansi membantu masyarakat menilai manfaat dan risiko secara lebih objektif serta mengurangi keraguan.

Penerimaan sosial dan kesediaan bekerja

Tabel 3. Penerimaan sosial dan kesediaan bekerja

Indikator	Kategori	Jumlah	Persentase
Tanggapan terhadap pembangunan	Setuju	57	87,69%
Tanggapan terhadap pembangunan	Ragu-ragu	8	12,31%
Tanggapan terhadap pembangunan	Tidak setuju	0	0,00%
Kesediaan bekerja	Ya	51	78,46%
Kesediaan bekerja	Tidak	10	15,38%
Kesediaan bekerja	Ragu-ragu	4	6,16%

Sumber: Tabulasi data primer kegiatan, 2026.

Dukungan sebesar 87,69% menunjukkan penerimaan sosial yang sangat tinggi. Tidak adanya responden yang menolak tidak berarti seluruh isu telah selesai, karena 12,31% masih ragu-ragu dan dukungan disertai sejumlah prasyarat. Penerimaan sosial bersifat dinamis; dukungan dapat menurun apabila janji terkait pengendalian dampak, akses masyarakat, atau kesempatan kerja tidak dilaksanakan. Karena itu, dukungan awal harus diterjemahkan menjadi kemitraan yang berkelanjutan.

Kesediaan bekerja sebesar 78,46% mengindikasikan adanya ekspektasi manfaat ekonomi secara langsung. Sementara itu, terhadap tenaga kerja dari luar, hanya 47,69% yang menyatakan setuju, 15,38% ragu-ragu, dan 36,92% yang tidak setuju. Temuan ini menegaskan sensitivitas isu rekrutmen. Kebijakan yang direkomendasikan adalah pemetaan kompetensi warga, pengumuman kebutuhan tenaga kerja secara terbuka, pemberian prioritas kepada warga lokal yang memenuhi syarat, program pelatihan prakonstruksi, dan pelaporan berkala mengenai komposisi tenaga kerja.

Saran, kekhawatiran, dan harapan masyarakat

Tabel 4. Sintesis aspirasi masyarakat

Tema	Aspirasi utama masyarakat
Pendidikan dan sosial	Membantu anak putus sekolah, mengurangi buta huruf, dan memutus rantai kemiskinan.
Tenaga kerja dan ekonomi	Mengutamakan tenaga kerja, guru yang memenuhi syarat, kontraktor, pemasok material, serta pelaku usaha lokal.
Aksesibilitas	Memperbaiki atau membangun jembatan permanen serta mempertahankan akses jalan menuju kebun warga.
Lingkungan	Melindungi sumber air, mengendalikan debu, kebisingan, limbah, banjir, longsor, serta sampah dan limbah.
Tata kelola	Membuka saluran aduan, menjaga keterbukaan informasi, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan.
Keselamatan	Menyiapkan mitigasi kebakaran, gempa, longsor, banjir, kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas.

Sumber: Sintesis diskusi publik dan kuesioner, 2026.

Aspirasi masyarakat menunjukkan bahwa pendidikan, ekonomi lokal, infrastruktur akses, dan kualitas lingkungan dipandang sebagai satu kesatuan. Masyarakat tidak hanya meminta sekolah dibangun, tetapi juga menuntut pembangunan yang tidak menghilangkan akses dan sumber penghidupan yang sudah ada. Temuan ini relevan dengan kajian dampak sosial-ekonomi-budaya yang menekankan perlunya memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif melalui strategi pengelolaan yang spesifik terhadap kondisi lokal (Muslihudin et al., 2021).

Kekhawatiran mengenai air, banjir, debu, limbah, dan lalu lintas perlu diterjemahkan menjadi indikator pemantauan yang dapat dipahami oleh masyarakat. Misalnya, pengukuran kualitas air sebelum konstruksi sebagai data dasar, pemeriksaan berkala, pengendalian penyiraman jalan, penutup kendaraan material, jam operasional kendaraan berat, saluran drainase sementara, tempat penyimpanan limbah, dan prosedur tanggap darurat. Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dapat meningkatkan legitimasi dan kualitas pengawasan. Kocu et al., (2024) menegaskan bahwa pemangku kepentingan nonpemerintah memiliki peran penting dalam penyediaan data, masukan, advokasi, dan pengawasan.

Model tindak lanjut partisipatif

Berdasarkan hasil kegiatan, tindak lanjut dapat disusun dalam 5 komponen. Pertama, komunikasi publik dilakukan secara berkala melalui pertemuan desa, papan informasi, dan media digital. Kedua, mekanisme penanganan pengaduan mencatat jenis keluhan, waktu respons, tindakan koreksi, serta status penyelesaian. Ketiga, rekrutmen dan pengadaan lokal yang transparan. Keempat, pemantauan lingkungan berbasis indikator dan pelibatan perwakilan

masyarakat. Kelima, evaluasi manfaat pendidikan dan sosial ekonomi setelah sekolah beroperasi.

Pendekatan tersebut sejalan dengan pembelajaran dari pengembangan berbasis masyarakat yang menempatkan warga sebagai pelaku, bukan hanya sebagai penerima manfaat (Asmoro et al., 2021). Pendampingan dan peningkatan kapasitas juga penting agar partisipasi tidak berhenti pada kehadiran dalam forum, tetapi berkembang menjadi kemampuan untuk memberikan masukan, mengawasi, dan memanfaatkan program (Ali, 2022; NurSekti, 2023).

Kesimpulan

Kegiatan konsultasi publik rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tikonu telah menjadi sarana untuk menyampaikan informasi, menghimpun aspirasi, serta mengidentifikasi tingkat penerimaan masyarakat terhadap rencana pembangunan tersebut. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah mengetahui rencana pembangunan (81,54%), memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan (87,69%), dan memiliki minat untuk terlibat sebagai tenaga kerja apabila tersedia kesempatan yang sesuai (78,46%). Temuan ini menunjukkan adanya penerimaan sosial awal yang didukung oleh harapan akan peningkatan akses pendidikan, pengurangan risiko putus sekolah, serta peluang ekonomi lokal.

Namun, penerimaan masyarakat tidak hanya bergantung pada manfaat pembangunan, tetapi juga pada kemampuan pengelola kegiatan dalam merespons aspirasi dan kekhawatiran warga. Masyarakat menekankan pentingnya perlindungan sumber air, pengendalian debu dan kebisingan, pengelolaan limbah, pemeliharaan akses jalan kebun, peningkatan transparansi informasi, penyediaan mekanisme pengaduan, serta keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal.

Berdasarkan hasil tersebut, keberlanjutan dukungan masyarakat terhadap pembangunan Sekolah Rakyat memerlukan pendekatan partisipatif yang dilakukan secara berkelanjutan melalui komunikasi publik, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pemantauan, penerapan pengelolaan lingkungan berbasis indikator, serta evaluasi manfaat sosial dan ekonomi setelah pembangunan berjalan. Dengan demikian, konsultasi publik tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga menjadi mekanisme kolaborasi untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang inklusif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka, Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka, Pemerintah Kecamatan Wundulako, Pemerintah Desa Tikonu, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta seluruh responden yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Daftar Pustaka

- Akbar, S., Noviyanti, E., Khadijah, U. L. S., & Deinaputra, R. D. (2021). Community empowerment in the context of sustainable tourism development in Surodadi Village. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(2). <https://doi.org/10.21831/jppm.v8i2.39164>
- Ali, A. (2022). Increasing the entrepreneurial independence of community through empowerment. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jppm/article/view/52652>
- Arief, I., & Thahir, H. (2025). Implementasi lokalitas berkelanjutan pada perencanaan ruang terbuka: Kasus “Nosintuvu” pada Huntap Balaroa. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 20(1). <https://jurnal.uns.ac.id/region/article/view/79588>
- Asmoro, A. Y., Yusrizal, F., & Saputra, I. (2021). Pariwisata berbasis masyarakat di Desa Sekapuk: Sebuah participatory action research. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(1), 30–47. <https://doi.org/10.21831/jppm.v8i1.34144>
- Khadijah, S., Kusumastuti, K., & Miladan, N. (2022). Kesesuaian proses perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa di Triharjo, Kabupaten Kulon Progo. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*. <https://jurnal.uns.ac.id/region/article/view/56863>
- Khadijah, S., Kusumastuti, K., & Miladan, N. (2023). Kesesuaian proses perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa di Triharjo, Kabupaten Kulon Progo. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 18(2), 372–395. <https://doi.org/10.20961/REGION.V18I2.56863>
- Kocu, Y., Bawole, R., Pattiasina, T., & Hematang, F. (2024). Peran stakeholder dalam Kajian

- Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Manokwari. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(1), 228–239. <https://doi.org/10.14710/jil.22.1.228-239>
- Muarifuddin, M. (2017). Implementasi pembangunan Desa Wisata Batik Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 4(1), 51–70. <https://doi.org/10.21831/jppm.v4i1.12713>
- Muslihudin et al., M. (2021). Analisis dampak sosial ekonomi budaya kegiatan eksplorasi panasbumi di WKP Baturraden. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/36847>
- NurSekti, M. (2023). Women's participation in training on the processing of local resources. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jppm/article/view/58871>
- Putra, I. M., & Madya, E. B. (2020). Flood mitigation efforts through community empowerment in Medan City, North Sumatera. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 7(2). <https://journal.uny.ac.id/index.php/jppm/article/view/32634>
- Yusuf, A., Susilo, H., Mardiyah, S., & Nugroho, R. (2022). The role of Giri Mulya Study Group Community in improving community empowerment. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 9(1). <https://journal.uny.ac.id/index.php/jppm/article/view/45231>